

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1 Program Prioritas

Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD baik yang bersifat Program prioritas maupun program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Perincian program dan indikator kinerja program dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut.

8.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Pendidikan Non Formal
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- g. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

2) Kesehatan

- a. Program Kesehatan Masyarakat
- b. Program pencegahan dan pengendalian penyakit
- c. Program pelayanan kesehatan
- d. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
- e. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- f. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
- g. Program pelayanan BLUD

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- b. Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum
- c. Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi
- d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- e. Program Pembangunan/ peningkatan Jalan dan Jembatan
- f. Program penataan bangunan dan lingkungan
- g. Program Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- i. Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Program penegakan hukum dan HAM
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- c. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- d. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- e. Program pendidikan politik masyarakat
- f. Program Penanggulangan Bencana
- g. Program Penanggulangan Kebakaran

6) Sosial

- a. Program Penanggulangan Kemiskinan
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Pemberdayaan Sosial
- e. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- f. Program penanganan Korban pasca Bencana

8.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja

- a. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
- b. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
- d. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- c. Program Perlindungan Anak
- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

3) Pangan

- a. Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan
- b. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Peningkatan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
- e. Program Pengembangan SDM dan Penyuluh Pertanian

4) Pertanian

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5) Lingkungan hidup

- a. Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program penataan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil
- b. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- d. Program Penataan Desa
- e. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Program keluarga berencana

9) Perhubungan

- a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat
- b. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- c. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
- d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara
- e. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut

10) Komunikasi & Informatika

- a. Program pengembangan e-government
- b. Program pengembangan informasi dan komunikasi publik

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- b. Program Peningkatan Akses terhadap Sumber daya Produktif
- c. Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi

12) Penanaman Modal

- a. Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
- b. Program peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
- c. Program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan

- d. Program Pengembangan data dan informasi

13) Kepemudaan dan olah raga

- a. Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- b. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
- c. Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
- e. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

14) Statistik

- a. Program Pengembangan Data/Informasi
- b. Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan

15) Persandian

- a. Program Persandian Untuk pengamanan informasi

16) Kebudayaan

- a. Program pengembangan nilai budaya
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya
- c. Program pengelolaan keragaman budaya

17) Perpustakaan

- a. Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- b. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan

18) Kearsipan

- a. Program Pengelolaan dan Pengolahan Arsip
- b. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola Kearsipan

8.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap
- b. Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya
- c. Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan
- d. Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- e. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- f. Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

2. Pariwisata

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
- c. Program Pengembangan Industri Pariwisata
- d. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3. Pertanian

- a. Program peningkatan kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan
- c. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

4. Kehutanan

- a. Program Pengembangan, Pemanfaatan, Rehabilitasi dan Pengamanan Kawasan Hutan

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
- b. Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- c. Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas
- d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- e. Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi

6. Perdagangan

- a. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
- b. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

7. Perindustrian

- a. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
- b. Program penataan struktur industri
- c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- d. Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi

8. Transmigrasi

- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

8.1.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Program perencanaan Perekonomian
- c. Program Perencanaan sosial budaya
- d. Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup
- e. Program Perencanaan Pemerintahan
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- g. Program Kerjasama Pembangunan

2. Keuangan

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah
- c. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- d. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- e. Program peningkatan koordinasi pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah
- f. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- g. Program peningkatan pelayanan dan informasi Publik
- h. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil Pengawasan

3. Kepegawaian

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Sekretariat DPRD

- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

5. Sekretariat Daerah

- a. Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
- b. Program Peningkatan Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- c. Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- d. Program e-Government
- e. Program Kelembagaan Organisasi pemda
- f. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- g. Program Peningkatan pelayanan dan Informasi Publik
- h. Program Pembentukan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih sebagai upaya pencegahan KKN
- i. Program peningkatan koordinasi sinkronisasi dan asistensi pembangunan
- j. Program penelitian dan publikasi pembangunan
- k. Program Peningkatan kinerja BUMD
- l. Program Pelayanan Rumah Tangga KDH/WKDH
- m. Program Dukungan Pelayanan Umum
- n. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- o. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
- p. Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum
- q. Program Pengembangan Data/Informasi
- r. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah
- s. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- t. Program Peningkatan efektivitas pengelolaan Barang milik daerah
- u. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
- v. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

- w. Program Pembinaan, Fasilitasi, Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
- x. Program koordinasi pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan

6. Inspektorat Daerah

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah
- b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan
- c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan
- d. Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

7. Kantor Penghubung

- a. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
- b. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
- c. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- e. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
- f. Program Kerjasama dan Koordinasi Dengan Berbagai Pihak
- g. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah

8. Badan Pengelola Perbatasan

- a. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- b. Program Kerjasama Pembangunan
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

8.1.5 Program Seluruh Perangkat Daerah

Selain program-program pembangunan, setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan beberapa program penunjang sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Peningkatan disiplin aparatur
- f. Program Perencanaan Pembangunan daerah
- g. Program pengembangan data/informasi

8.2 Kebutuhan Pendanaan (Pagu Indikatif)

Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Kelompok Urusan Pemerintahan diatas, ditetapkan Pagu Indikatif pada masing-masing urusan pemerintahan sebagaimana tercantum pada Tabel 8.1

Tabel 8.1
Rencana Alokasi Anggaran (Pagu Indikatif) Per Urusan Pemerintahan
Tahun 2017-2021

No	Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Urusan Pendidikan	205.858.366.000	233.744.740.056	255.071.416.830	280.662.706.906	316.661.853.438
	Dinas Pendidikan	205.858.366.000	233.744.740.056	255.071.416.830	280.662.706.906	316.661.853.438
2	Urusan Kesehatan	225.691.054.715	244.059.628.216	265.595.176.920	288.923.444.560	312.945.026.872
	Dinas Kesehatan	46.221.735.000	50.629.438.000	54.805.234.400	55.514.450.000	46.593.345.000
	RSUD Tanjunguban	28.275.000.000	28.025.000.000	30.975.000.000	35.525.000.000	40.425.000.000
	RSUD Batu 8 Tanjungpinang	151.194.319.715	165.405.190.216	179.814.942.520	197.883.994.560	225.926.681.872
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	291.228.574.485	337.383.574.485	379.262.782.375	407.636.160.027	461.055.516.645
	Dinas Pekerjaan Umum	288.853.574.485	334.153.574.485	376.182.782.375	405.711.160.027	459.455.516.645
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.375.000.000	3.230.000.000	3.080.000.000	1.925.000.000	1.600.000.000
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	40.000.000.000	42.000.000.000	77.600.000.000	94.920.000.000	105.389.000.000
	Dinas Pekerjaan Umum	40.000.000.000	42.000.000.000	77.600.000.000	94.920.000.000	105.389.000.000
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	32.946.895.840	36.004.458.936	39.460.741.595	42.468.444.902	47.646.267.438
	Satuan Polisi Pamong Praja	21.633.470.760	23.796.817.836	26.176.499.620	28.794.149.582	31.673.564.540
	Badan Kesbangpol	8.093.190.000	8.497.849.500	8.922.741.975	9.368.879.074	9.837.323.027
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.220.235.080	3.709.791.600	4.361.500.000	4.305.416.246	6.135.379.871
6	Sosial	37.501.885.820	37.518.771.900	38.120.103.660	36.597.616.090	34.267.114.009
	Dinas Sosial	31.713.164.900	31.318.711.900	31.580.766.900	28.912.111.900	27.212.481.400
	BPBD	5.788.720.920	6.200.060.000	6.539.336.760	7.685.504.190	7.054.632.609
7	Urusan Ketenagakerjaan	20.281.198.991	22.281.198.991	25.281.198.991	25.581.198.991	27.581.198.991
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	20.281.198.991	22.281.198.991	25.281.198.991	25.581.198.991	27.581.198.991

No	Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.387.185.207	10.387.185.207	12.191.567.459	14.591.567.459	16.591.567.459
	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.387.185.207	10.387.185.207	12.191.567.459	14.591.567.459	16.591.567.459
9	Urusan Pangan	18.230.000.000	18.310.000.000	18.584.000.000	18.196.000.000	19.512.000.000
	Badan Ketahanan Pangan	18.230.000.000	18.310.000.000	18.584.000.000	18.196.000.000	19.512.000.000
10	Pertanahan	908.523.861	995.656.845	1.086.499.752	1.195.508.165	1.348.849.783
	Biro Administrasi Pemerintahan Setda	908.523.861	995.656.845	1.086.499.752	1.195.508.165	1.348.849.783
11	Urusan Lingkungan Hidup	14.227.400.000	23.077.400.000	25.077.400.000	22.827.400.000	22.927.400.000
	Badan Lingkungan Hidup	14.227.400.000	23.077.400.000	25.077.400.000	22.827.400.000	22.927.400.000
12	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	6.857.522.464	7.857.522.464	8.857.522.464	9.057.522.464	10.057.522.464
	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	6.857.522.464	7.857.522.464	8.857.522.464	9.057.522.464	10.057.522.464
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.531.908.183	15.531.908.183	16.531.908.183	17.931.908.183	18.931.908.183
	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.531.908.183	15.531.908.183	16.531.908.183	17.931.908.183	18.931.908.183
14	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.725.571.584	2.986.970.534	3.259.499.255	3.586.524.494	4.046.549.348
	Dinas Kesehatan	2.725.571.584	2.986.970.534	3.259.499.255	3.586.524.494	4.046.549.348
15	Urusan Perhubungan	98.969.465.291	134.080.829.844	125.967.629.169	264.203.398.528	227.761.778.723
	Dinas Perhubungan	98.969.465.291	134.080.829.844	125.967.629.169	264.203.398.528	227.761.778.723
16	Urusan Komunikasi Dan Informatika	25.463.142.229	25.963.142.229	27.363.142.229	28.363.142.229	29.363.142.229
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	25.463.142.229	25.963.142.229	27.363.142.229	28.363.142.229	29.363.142.229
17	Urusan Koperasi Dan UMKM	24.610.641.319	27.071.705.451	29.778.875.996	32.756.763.596	36.032.439.955
	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	24.610.641.319	27.071.705.451	29.778.875.996	32.756.763.596	36.032.439.955
18	Urusan Penanaman Modal	9.328.177.303	18.328.177.303	11.828.177.303	12.828.177.303	15.828.177.303
	Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu	9.328.177.303	18.328.177.303	11.828.177.303	12.828.177.303	15.828.177.303
19	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	22.303.945.283	25.303.945.283	26.303.945.283	30.303.945.283	33.303.945.283
	Dinas Pemuda Dan Olahraga	22.303.945.283	25.303.945.283	26.303.945.283	30.303.945.283	33.303.945.283

No	Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
20	Urusan Statistik	9.660.000.000	15.755.000.000	10.600.000.000	8.000.000.000	8.510.000.000
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.660.000.000	15.755.000.000	10.600.000.000	8.000.000.000	8.510.000.000
21	Urusan Persandian	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	Biro Umum Setda	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
22	Urusan Kebudayaan	19.175.377.793	31.825.377.793	20.875.377.793	22.875.377.793	26.375.377.793
	Dinas Kebudayaan	19.175.377.793	31.825.377.793	20.875.377.793	22.875.377.793	26.375.377.793
23	Urusan Perpustakaan	23.820.315.179	23.820.315.179	23.920.315.179	24.720.315.179	24.720.315.179
	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah	23.820.315.179	23.820.315.179	23.920.315.179	24.720.315.179	24.720.315.179
24	Urusan Kearsipan	1.888.528.419	2.069.649.821	2.258.482.959	3.474.589.168	2.803.824.156
	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah	1.888.528.419	2.069.649.821	2.258.482.959	3.474.589.168	2.803.824.156
25	Urusan Kelautan Dan Perikanan	69.943.256.856	76.301.242.086	83.644.838.023	92.036.916.366	103.842.013.221
	Dinas Kelautan Dan Perikanan	69.943.256.856	76.301.242.086	83.644.838.023	92.036.916.366	103.842.013.221
26	Urusan Pariwisata	25.461.023.825	26.461.023.825	26.761.023.825	29.556.006.743	33.347.002.096
	Dinas Pariwisata	25.461.023.825	26.461.023.825	26.761.023.825	29.556.006.743	33.347.002.096
27	Urusan Pertanian	19.158.894.984	23.158.894.984	24.208.894.984	25.210.802.221	28.444.460.776
	Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Peternakan	19.158.894.984	23.158.894.984	24.208.894.984	25.210.802.221	28.444.460.776
28	Urusan Kehutanan	2.276.035.912	2.494.321.647	2.721.901.492	2.994.989.600	3.379.141.348
	Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Peternakan	2.276.035.912	2.494.321.647	2.721.901.492	2.994.989.600	3.379.141.348
29	Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral	19.750.000.000	19.750.000.000	19.750.000.000	19.750.000.000	19.750.000.000
	Dinas Pertambangan Dan Energi	19.750.000.000	19.750.000.000	19.750.000.000	19.750.000.000	19.750.000.000
30	Urusan Perdagangan	17.636.433.731	18.947.205.512	20.429.563.776	21.918.301.185	23.970.485.566
	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	17.636.433.731	18.947.205.512	20.429.563.776	21.918.301.185	23.970.485.566
31	Urusan Perindustrian	9.690.000.000	11.000.000.000	12.250.000.000	14.040.000.000	16.600.000.000
	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	9.690.000.000	11.000.000.000	12.250.000.000	14.040.000.000	16.600.000.000

No	Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
32	Urusan Transmigrasi	126.447.327	138.574.397	151.217.810	166.389.478	187.231.392
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	126.447.327	138.574.397	151.217.810	166.389.478	187.231.392
	Penunjang Urusan Pemerintahan					
33	Perencanaan Pembangunan	45.641.520.000	39.762.520.000	38.596.520.000	37.532.520.000	41.298.520.000
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	45.641.520.000	39.762.520.000	38.596.520.000	37.532.520.000	41.298.520.000
34	Keuangan Daerah	68.909.875.742	73.198.835.840	77.852.813.075	86.314.548.837	93.202.251.296
	Dinas Pendapatan Daerah	37.181.995.742	37.636.055.840	42.237.383.075	42.355.468.837	43.240.771.296
	Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah	31.727.880.000	35.562.780.000	35.615.430.000	43.959.080.000	49.961.480.000
35	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	23.103.109.685	23.703.109.685	23.993.435.163	25.393.435.163	26.713.312.117
36	Sekretariat DPRD	96.737.115.235	106.014.795.018	115.687.497.240	120.687.497.240	143.621.805.026
37	Sekretariat Daerah	288.151.282.112	309.388.372.155	328.908.946.399	344.906.231.514	377.413.264.861
	Biro Administrasi Pemerintahan	8.371.400.000	8.957.398.000	9.673.989.840	10.447.909.027	11.492.699.930
	Biro Hukum	4.397.500.000	4.805.530.000	5.170.000.000	5.668.371.792	5.675.000.000
	Biro Administrasi Pembangunan	6.214.800.000	6.649.836.000	7.181.822.880	7.756.368.710	8.532.005.581
	Biro Umum	98.080.303.820	101.631.096.863	106.186.923.747	112.432.737.523	116.649.208.270
	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	10.492.900.000	11.713.403.000	12.094.475.240	13.096.033.259	14.380.636.585
	Biro Administrasi Perekonomian	5.485.250.000	5.869.217.500	6.338.754.900	6.845.855.292	7.530.440.821
	Biro Perlengkapan	94.766.928.292	102.969.558.792	110.043.061.232	110.462.443.867	127.428.610.425
	Biro Organisasi	5.225.400.000	7.817.356.000	8.526.944.480	9.408.100.038	10.057.410.042
	Biro Humas Dan Protokol	55.116.800.000	58.974.976.000	63.692.974.080	68.788.412.006	75.667.253.207
38	Inspektorat Daerah	11.231.666.702	12.308.852.091	13.426.901.576	15.431.901.576	16.675.215.519
39	Kantor Penghubung	12.667.475.114	12.667.475.114	12.699.620.854	12.721.234.877	14.352.921.550
40	Badan Pengelola Perbatasan	7.256.677.679	8.556.677.679	9.356.677.679	10.356.677.679	11.506.677.679
	Jumlah Total Seluruh Urusan	1.873.486.494.870	2.100.359.058.753	2.255.465.615.291	2.550.869.163.798	2.758.115.077.697

Secara rinci indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan tercantum pada Tabel 8.2